

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam Merumuskan bahan/materi kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Hutan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesekretariatan.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan strategis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - b. Pelaksanaan kebijakan strategis di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)
1.	Menurunnya beban pencemar air yang bersumber dari usaha/kegiatan	Persentase usaha/kegiatan dengan sistem pembuangan limbah sesuai standar	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah usaha/kegiatan yg taat terhadap ketentuan proper dan ijin lingkungan dibagi jumlah total usaha/kegiatan dibawah kewenangan provinsi x 100%</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b> Tahunan</p> <p><b>Sumber Data :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketaatan usaha/kegiatan yang perijinannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</li> <li>2. Peringkat usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam PROPER</li> </ol> <p><b>Alasan :</b> Untuk menggambarkan kondisi ketaatan usaha/kegiatan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan</p>
2.	Meningkatnya kualitas udara perkotaan	Persentase titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu emisi	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Jumlah titik pantau udara perkotaan yang memenuhi standar baku mutu emisi dibagi jumlah total titik pantau udara x 100%</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b> Tahunan</p> <p><b>Sumber Data:</b> Hasil pantau udara melalui passive sampler di 10 kab/kota</p> <p><b>Alasan :</b> Untuk menggambarkan kualitas udara di Provinsi NTB</p>

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan, Sumber Data, Alasan)
3.	Kawasan hutan dan lahan yang dipertahankan kelestariannya	Persentase luas kawasan hutan dan lahan lestari	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Luas tutupan kawasan hutan dan lahan dibagi total luas hutan dan lahan dikali 100%</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b> Tahunan</p> <p><b>Sumber Data:</b></p> <p><b>Alasan :</b> Untuk menggambarkan kondisi tutupan kawasan hutan dan lahan di Provinsi NTB</p>
4.	Berkurangnya lahan kritis	Persentase penurunan lahan kritis	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Data luas lahan kritis tahun lalu dikurangi data luas lahan kritis tahun berjalan dibagi luas lahan kritis tahun lalu dikali 100%</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b> Tahunan</p> <p><b>Sumber Data:</b> Luas lahan kritis yang ditetapkan Kementerian LHK</p> <p><b>Alasan :</b> Untuk menggambarkan kondisi lahan kritis Provinsi NTB</p>
5.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Total sampah masuk ke TPA se-NTB/total proyeksi timbulan sampah x 100%</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b> Tahunan</p> <p><b>Sumber Data:</b></p> <p><b>Alasan :</b> Untuk menggambarkan kondisi penanganan sampah di Provinsi NTB</p>
6.	Meningkatnya cakupan pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Total sampah yang diolah oleh masyarakat/ total proyeksi timbulan sampah x 100%</p> <p><b>Tipe Perhitungan :</b> Tahunan</p> <p><b>Sumber data :</b></p> <p>Data sampah yang diolah masyarakat melalui bank sampah, TPS 3R, pengepul, maupun pengolahan sampah secara mandiri oleh masyarakat/swasta</p> <p><b>Alasan :</b> Untuk menggambarkan kondisi pengelolaan sampah di Provinsi NTB</p>

Mataram, 2023  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
 Provinsi Nusa Tenggara Barat



Julmansyah, S.Hut.,M.AP  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19740701 200212 1 005